

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Akuntansi adalah proses mencatat, mengklarifikasi, meringkas, menganalisis, dan menyajikan informasi keuangan suatu entitas secara sistematis untuk pengambilan keputusan internal dan eksternal. Definisi akuntansi merupakan suatu kegiatan jasa yang fungsinya menyediakan informasi. Informasi tersebut dalam bentuk kuantitatif, terutama yang bersifat keuangan tentang entitas ekonomi yang berguna dalam mengambil keputusan ekonomi (Wolk dan Rozycki, 2017).

Memasuki era globalisasi, aliran dana saat ini tidak lagi mengenal batas negara dan tuntutan transparansi informasi keuangan yang semakin berkembang, baik dari pengguna laporan keuangan di dalam negeri maupun di luar negeri dan para pelaku bisnis diuntut untuk menyusun suatu laporan keuangan. Laporan keuangan tidak hanya dibuat oleh organisasi yang berorientasi laba, organisasi nirlaba juga memerlukan laporan keuangan yang berguna untuk mengetahui kegiatan organisasi dalam satu periode dan kemampuan organisasi dalam memberikan pelayanan, penyaluran dana dan kegiatan sosial lainnya kepada pihak yang membutuhkan. Karena hal itu, organisasi nirlaba juga membutuhkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana yang diterima.

Standar Akuntansi Keuangan untuk organisasi nirlaba telah dibuat oleh Ikatan Akuntan Indonesia, yaitu PSAK 45 dari tahun 2009. Efektif Per 1 Januari 2020, PSAK 45 dicabut dan digantikan oleh ISAK 35 penyajian laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba. Penerbitan ISAK 35 menjadikan penerapan keseluruhan SAK untuk pelaporan keuangan entitas berorientasi nirlaba menjadi jelas dengan pengecualian seperti dijelaskan dalam ISAK 35. Keberadaan PSAK sendiri untuk entitas berorientasi nonlaba sering menimbulkan anggapan hanya PSAK 45 yang relevan

digunakan. Dengan adanya standar tersebut, semua organisasi nirlaba harus menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar yang berlaku. Standar tersebut digunakan supaya pelaporan keuangan tertata dengan rapi dan menjaga akuntabilitas serta transparansi pihak donatur. Penyajian laporan keuangan terkendala dengan keterbatasan sumber daya dan pengetahuan tentang penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi. Organisasi nirlaba masih belum memiliki kesadaran atas pentingnya transparansi dan akuntabilitas terhadap laporan keuangan bagi pihak eksternal maupun internal. Pengelolaan keuangan yang baik diyakini bisa meningkatkan kepercayaan pihak eksternal terhadap keberlangsungan hidup suatu organisasi nirlaba. Keberlangsungan hidup dan perkembangan merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap entitas.

Segala aktivitas suatu entitas yang dilakukan untuk mencapainya harus didukung oleh kondisi manajemen yang baik sebagai tim pengelola. Selain dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi, manajemen juga dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh pihak entitas. Manajemen dari suatu entitas juga digunakan untuk pengambilan keputusan dalam jangka waktu yang akan datang. Untuk tercapainya semua tujuan suatu entitas perlu adanya dukungan yang seimbang antara pihak internal dan pihak eksternal.

Pengguna laporan keuangan entitas berorientasi nirlaba umumnya memiliki kepentingan untuk menilai: (a) cara manajemen melaksanakan tanggung jawab atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka; serta (b) informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomik. Kemampuan entitas berorientasi nirlaba dalam menggunakan sumber daya tersebut dikomunikasikan melalui laporan keuangan (Ikatan Akuntan Indonesia: 2018). Adapun standar akuntansi untuk entitas nirlaba yang saat ini digunakan adalah Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 35. Sebelum menggunakan ISAK 35 terlebih dahulu organisasi

nirlaba menggunakan standar Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 45 namun kemudian diganti dengan ISAK 35.

Dengan adanya peraturan ISAK 35 diharapkan organisasi nirlaba dapat menyusun laporan keuangannya sesuai dengan peraturan tersebut. Struktur laporan keuangan organisasi nirlaba yang sesuai dengan ISAK 35 yang terdiri dari (1) laporan posisi keuangan yang berisi jumlah asset, liabilitas, serta aset neto, (2) laporan aktivitas yang menyajikan keseluruhan perubahan aset neto selama satu tahun, (3) laporan arus kas yang menyajikan keseluruhan dana kas masuk maupun keluar, (4) laporan penghasilan komprehensif, (5) CALK (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Tetapi munculnya peraturan baru ini terasa sulit untuk diterapkan ketika organisasi nirlaba tersebut tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi sehingga akan sangat sulit untuk menerapkannya dalam pencatatan laporan keuangan.

Organisasi nirlaba dalam melaksanakan program-programnya menggunakan sumber daya yang berasal dari masyarakat, maka pertanggungjawaban laporan keuangannya harus bersifat terbuka dan akuntabilitas kepada masyarakat. Namun sangat disayangkan ketika masih ada organisasi nirlaba yang tidak menyajikan laporan keuangan yang seharusnya dibuat oleh organisasi nirlaba. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, laporan keuangan organisasi nirlaba terdiri atas laporan posisi keuangan, laporan penghasilan komprehensif, laporan aset neto, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Seharusnya organisasi nirlaba bisa melakukan pencatatan keuangan secara transparan agar bisa mempertanggungjawabkan dana yang didapatkan karena dana yang didapatkan berasal dari sumbangan pihak eksternal. Karena hal itu hendaknya organisasi nirlaba seharusnya bisa mempertahankan kepercayaan pihak yang sudah memberikan sumbangan dengan cara menyampaikan laporan keuangannya secara terperinci.

Salah satu organisasi nirlaba di Indonesia yaitu pondok pesantren. Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan tempat para kyai

menanamkan ilmu agama Islam kepada para santrinya. Pada dasarnya pondok pesantren didirikan dari tanah wakaf atau uang yang dihibahkan untuk kemaslahatan umat. Melihat tren positif dari perkembangan jumlah pondok pesantren di Indonesia, optimisasi atas perkembangan tersebut sejak dahulu pesantren tidak hanya berfungsi dalam proses pendidikan, melainkan juga dakwah dan pemberdayaan masyarakat. Jumlah pondok pesantren di Indonesia dari tahun 2001 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia, pada tahun 2001 jumlah pesantren yang ada di Indonesia sebanyak 13.078 dan terus bertambah sampai tahun 2006 jumlah pesantren seluruh Indonesia sudah mencapai 16.000. Menurut data Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama bahwa data pondok pesantren pada tahun 2009 sampai 2012 berjumlah 27.230 pondok pesantren yang tersebar di seluruh Indonesia. Data terbaru dalam website Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Republik Indonesia bahwa jumlah Pondok Pesantren di Indonesia sebanyak 39.043 pesantren pada tahun 2020 sampai 2023, dengan total santri sebanyak 4,8 juta.

Annisa Putri Wulansari (2023) mengatakan bahwa masih banyak pesantren yang belum menerapkan pedoman akuntansi pesantren dalam pelaporan keuangannya. Beberapa faktor yang menjadi kendala antara lain kurangnya pemahaman mengenai pentingnya pedoman akuntansi pesantren, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam bidang akuntansi, dan kurangnya dukungan dari pihak-pihak terkait. Untuk mengatasi kendala tersebut diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya pedoman akuntansi pesantren, melatih sumber daya manusia yang terkait dalam bidang akuntansi, dan memberikan dukungan dari pihak-pihak terkait, seperti pemerintah dan lembaga keuangan (www.babel.antaranews.com).

Penelitian yang dilakukan oleh Galang, Nugroho, Setiono, dan Baidlowi., pada tahun 2023 menyatakan bahwa Yayasan Pondok Pesantren Roudhotul Muttaqin Kabupaten Mojokerto belum menerapkan laporan

keuangan berdasarkan ISAK 35 dan belum melakukan pencatatan siklus akuntansi berdasarkan pedoman akuntansi pondok pesantren. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Maulana dan Rahmat, pada tahun 2021 menyatakan bahwa pencatatan keuangan Besar Al-Atqiyah masih menggunakan metode yang sederhana. Pencatatan keuangan hanya dilakukan jika terjadi kas masuk dan kas keluar (basis kas). Kemudian jumlah kas masuk, kas keluar, dan total kas dilaporkan setiap hari Jum'at. Kemudian penyusunan laporan keuangan Masjid Besar Al-Atqiyah yang disusun berdasarkan ISAK No. 35 menghasilkan laporan keuangan yang lebih terstruktur dan lebih terperinci bukan hanya terkait kas masuk dan kas keluar semata.

Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Tambak merupakan salah satu Pondok Pesantren di Kecamatan Tambak Kabupaten Banyumas yang berada di bawah Yayasan Hidayaturrahman. Berdirinya Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah, berawal dari keinginan para tokoh masyarakat khususnya di kompleks Masjid Baiturrahman Kecamatan Tambak agar menjadi masyarakat yang islami dan menjadi kota santri yang perhatian kepada kaum Yatim Piatu dan Dhu'afa. Tokoh masyarakat tersebut adalah H. Budiono, Kyai Arifin, dan Kyai Nur Salam. Pada 23 Juli 2000 berdirilah pengelolaan Yatim Piatu dan Dhu'afa Al-Hidayah. Sebagai pengasuh yakni KH. Ali Ma'ruf dari Selandaka, dan Nyai Hj. Laily Badriyah Al-Khafidhoh dari Lampung yang berlatar santri pesantren. Pada awal berdiri, hanya terdapat dua anak santri, seiring berjalannya waktu santri terus bertambah sampai tanggapan masyarakat Desa Purwodadi dan masyarakat Kecamatan Tambak pada umumnya begitu antusias dan diterima baik serta semakin mendapat kepercayaan dari masyarakat. Akhirnya berkembang sekarang Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah menerima santri reguler. Sehingga sekarang, hampir 90% adalah santri reguler (bukan Yatim Piatu dan Dhu'afa).

Penelitian ini mencoba mengimplementasikan laporan keuangan organisasi nirlaba berdasarkan ISAK 35 pada Pondok Pesantren Tahfidzul

Qur'an Al-Hidayah Tambak. Dengan adanya fenomena di lapangan yang menunjukkan bahwa pengurus pondok, khususnya bendahara pondok yang merupakan pengelola keuangan pondok bukan dari seorang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, melainkan santri yang ditunjuk secara sukarela untuk menjadi pengurus pondok. Sehingga dengan adanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaporan keuangan dan implementasi laporan keuangan berdasarkan ISAK 35 pada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Tambak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah pada fokus penelitian serta ketaatan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Tambak pada peraturan yang berlaku dalam pencatatan laporan keuangan organisasi nirlaba dan kegunaan laporan keuangan yang tersusun sesuai ISAK 35 bagi pihak eksternal dan internal pada pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Tambak untuk meningkatkan kepercayaan pihak eksternal dengan menerapkan aspek akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, maka peneliti berniat untuk memberi judul penelitian ini sebagai "Implementasi Laporan Keuangan Organisasi Nirlaba Berdasarkan ISAK 35 Pada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Tambak".

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan paparan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaporan keuangan pada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Tambak?
2. Bagaimana peran laporan keuangan bagi pihak eksternal dan internal pada pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Tambak?
3. Bagaimana implementasi ISAK 35 pada pencatatan laporan keuangan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Tambak?

C. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pelaporan keuangan pada Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Tambak.
2. Untuk menganalisis peran laporan keuangan bagi pihak eksternal dan internal pada pondok pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Tambak.
3. Untuk menganalisis implementasi ISAK 35 pada pencatatan laporan keuangan Pondok Pesantren Tahfidzul Qur'an Al-Hidayah Tambak.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dari beberapa pemaparan yang sudah disampaikan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, seperti :

1. Manfaat Teoritis

Dengan penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan juga ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan acuan peneliti lain. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih mendalam tentang pelaksanaan akuntansi keuangan pada lingkup organisasi nirlaba khususnya pondok pesantren.

2. Manfaat praktisi

a. Bagi Peneliti

Untuk menambah pemahaman dan juga untuk menginterpretasikan pengetahuan di bidang akuntansi mengenai pengimplementasian akuntansi keuangan dalam lingkungan pondok pesantren.

b. Bagi Pesantren

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan dalam pengambilan keputusan di masa yang akan datang, dan sebagai bahan landasan untuk memperbaiki laporan keuangannya.